

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dellarozza Al Sendya Putri (2023) Universitas Sebelas Maret dalam penelitiannya berjudul **"Implementasi Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) oleh BKKBN dalam Rangka Penurunan Stunting di Kota Yogyakarta"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aplikasi ELSIMIL dan upaya yang dapat dilakukan demi peningkatan aplikasi ELSIMIL dalam rangka penurunan angka stunting di Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilihat dari tiga aspek yaitu sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ELSIMIL berjalan dengan cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya penurunan angka stunting pada tahun 2021 sebesar 17,1 % menjadi 13,8 % pada tahun 2022. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan kasus tersebut yaitu dengan pendekatan melalui bidang akademis, pemberian informasi edukatif lewat media sosial dan bekerjasama dengan *influencer*.

2. Ramadhan (2024) Universitas Malikussaleh dalam penelitiannya yang berjudul **"Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di Kota Binjai"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program implementasi program elektronik siap nikah siap hamil (Elsimil) di Kota Binjai dan kendala apa saja yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilihat dari tiga aspek yaitu sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program elektronik siap nikah siap hamil (Elsimil) di Kota Binjai berjalan cukup baik dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya yang mencakup jumlah tim pendamping keluarga (TPK), fasilitas dan finansialnya sudah memadai. Agen pelaksana menjalankan perannya sesuai peraturan dan kondisi lingkungan memberi respon positif. Kendala yang ditemui secara internal yaitu masih adanya bug (kesalahan sistem) pada aplikasi elsimil, masih ada materi bimbingan yang tidak lengkap dan masih terdapat TPK yang belum mahir dalam mengoperasikan fitur aplikasi elsimil. Sedangkan kendala eksternalnya yaitu kondisi jaringan yang belum stabil dan masih minimnya tingkat kesadaran

calon pengantin dalam menjaga pola hidup sehat dan mencegah stunting.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah „Kebijakan“ yang dimaksud ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris „*policy*“ yang dibedakan dari kata „kebijaksanaan“ (*wisdom*) maupun „kebajikan“ (*virtues*). Jadi, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut Thomas R.Dye dalam Sahaya Anggara, 2014:35), *“Public policy is whatever the government choose to do or not to do.”* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Menurut Deddy Mulyadi, (2016: 26-27), *“Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang ditetapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengakibatkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu*

mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

James E. Anderson dalam (Karmanis, 2020: 6-7) memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018:17) mengungkapkan bahwa, “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat maupun warga negara”.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan para aktor yang bertindak atas nama rakyat demi kepentingan orang banyak atau publik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

b. Tahap-tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:
(Winarno, 2014: 32-34):

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena

itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain akan mungkin ditantang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Charles Lindblom dalam (Budi Winarno, 2014: 35-

37) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda adalah tahap-tahap kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang sangat baik untuk memaknai apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Tahapan kedua yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. Pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah.

c. Pengadopsian Kebijakan (*Policy Adoption*)

Pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk

membarikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik.

d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Tahapan keempat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan atau menetapkan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat luas.

e. Evaluasi

Setelah keempat tahapan dalam menentukan dan memberlakukan kebijakan publik dilakukan, pemerintah juga masih memiliki langkah terakhir yaitu evaluasi kebijakan yang sudah diberlakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Melalui tahapan evaluasi inilah pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana.

Jadi, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada 5 tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Tahapan tersebut saling berkaitan untuk mencapai pembuatan kebijakan yang baik dan maksimal.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidaknya. Sehingga

implementasi dari sebuah kebijakan bukan hanya sekedar impian atau rencana namun jika tidak dilaksanakan maka akan berakhir sia-sia.

Implementasi yang dikemukakan oleh para ahli dapat memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ada beberapa teori implementasi, yang diuraikan secara terperinci sebagai berikut :

a. Teori Implementasi

1) Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis, yaitu sebagai berikut berdasarkan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Mukhtar, 2018:36):

- a) Kondisi Lingkungan
Lingkungan sangat memengaruhi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio kultural keterlibatan penerima program.
- b) Hubungan antar organisasi
Implementasi sebuah program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Untuk membina kerja sama antar instansi atau instansi pemerintah dan masyarakat diperlukan komunikasi.
- c) Sumber daya organisasi untuk implementasi
Implementasi kebijakan harus didukung sumber daya, baik sumber daya manusia (human resource) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources).
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
Mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi dari implementasi suatu program.

2) Teori Donald S. Van Metter dan Carl E. Vam Horn

Model pendekatan top-down yang merumuskan oleh Van Metter & Van Horn disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Menurut Van Metter & Van Horn, ada enam variabel-variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (Agustino, 2020:151-153).

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci yaitu:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengeimplementasian kebijakaan publik.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para pelaksana sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

3) Teori Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan imolementasi suatu kebijakan, yaitu (Leo Agustino, 2020:154-158):

a) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- (1) Transmisi
- (2) Kejelasan
- (3) Konsistensi

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- (1) Staff
- (2) Informasi
- (3) Wewenang
- (4) Fasilitas

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- (1) Efek Disposisi
- (2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*)
- (3) Insentif

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kea rah yang lebih baik adalah:

- (1) Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOP) yang lebih fleksibel
- (2) Melaksanakan Fragmentasi

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, teori Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn, dan teori Edward III termasuk teori yang digunakan dalam mengukur implementasi.

b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Edward III dalam (Agus Subianto, 2020:70) mengemukakan dua pertanyaan pokok: “(1) Hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi suatu implementasi yang berhasil? (2) Apa saja yang menjadi penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi?”.

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, maka dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut yakni faktor komunikasi, sumber daya (*resources*), sikap birokrasi dan pelaksana serta struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi pelaksana.

a. Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (*clarity*), serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

b. Sumber Daya

Mencakup empat komponen yakni, staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *Authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. Disposisi

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

d. Struktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (*Standard Operating Procedures*), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program.

Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

3. Penggunaan

a. Pengertian Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penggunaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- 1) Penggunaan adalah proses atau cara perbuatan pengguna.

- 2) Penggunaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain.
- 3) Penggunaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.
- 4) Penggunaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Supriyanto (2018) penggunaan adalah proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

4. Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil)

a. Pengertian Aplikasi Elsimil

Elsimil adalah aplikasi skrinning dan pendampingan untuk calon pengantin (Catin), Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan dan Bayi Usia di baah dua tahun (Balita). Setiap pasangan Catin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, maupun Balita akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di Desa/Kelurahan yang sama dengan domisilinya.

Adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi (berat badan, tinggi badan, ukuran lingkar lengan dan perut, kadar hemoglobin (Hb), perilaku merokok, dan sampai data lingkungan tempat tinggal. Dari data ini, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi calon pengantin dengan faktor risiko stunting. Lalu,

Tim Pendamping Keluarga memberikan intervensi yang direkomendasikan sesuai kebutuhan, serta memonitor gizi calon pengantin demi mempersiapkan kehamilan yang sehat.

Aplikasi Elsimil versi terbaru dibagi menjadi dua yaitu untuk Tim Pendamping Keluarga dan Calon Pengantin, untuk Tim Pendamping Keluarga menggunakan platform berbasis *Web Browser* dengan alamat *elsimil.bkkbn.go.id* serta didukung aplikasi SIGA-MOBILE dan untuk Calon Pengantin menggunakan aplikasi Elsimil yang ada di *Playstore*.

b. Tujuan dan Fungsi Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil)

Tujuan utama aplikasi ini yakni mendeteksi dini kesehatan calon pengantin untuk mengetahui risiko melahirkan bayi stunting, calon pengantin dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi elsimil.

Aplikasi Elsimil selain berfungsi sebagai alat skrining dan media komunikasi dengan Tim Pendamping Keluarga, juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesiapan pranikah, dan kesiapan kehamilan.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mendapatkan edukasi seputar kesiapan kehamilan, kesiapan pranikah. Sementara, faktor risiko yang dapat dipantau melalui aplikasi Elsimil antara lain status gizi (berat badan dan tinggi badan), status kesehatan,

risiko terpapar asap rokok, dan usia calon pengantin perempuan. BKKBN berharap dengan peluncuran aplikasi Elsimil ini dapat berfungsi dan berhasil dalam mencegah stunting di Indonesia.

5. Pencegahan Stunting

a. Pengertian Stunting

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal (Kemenkes RI, 2018).

Stunting menjadi masalah gagal tumbuh yang dialami oleh bayi di bawah lima tahun yang mengalami kurang gizi semenjak di dalam kandungan hingga awal bayi lahir, stunting sendiri akan nampak ketika bayi berusia dua tahun (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017). Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schmidt bahwa stunting ini merupakan masalah kurang gizi dengan periode yang cukup lama sehingga muncul gangguan pertumbuhan tinggi badan pada anak yang lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (Schmidt, 2014).

b. Faktor Risiko Stunting

1. Status Gizi

Merupakan sebuah penilaian keadaan gizi yang diukur oleh seseorang pada satu waktu dengan pengumpulan data (Arisman, 2005). Status gizi menggambarkan kebutuhan tubuh seorang anak terpenuhi atau tidak.

2. Kebersihan Lingkungan

Sanitasi yang baik akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi (Kemenkes RI, 2018)

3. Makanan Pendamping ASI

Masalah kebutuhan gizi yang semakin tinggi akan dialami bayi mulai dari umur enam bulan membuat seorang bayi mulai mengenal Makanan Pendamping Asi (MP-ASI) yang mana pemberian MP-ASI untuk menunjang pertambahan sumber zat gizi disamping pemberian ASI hingga usia dua tahun. Makanan pendamping harus diberikan dengan jumlah yang cukup, sehingga baik jumlah, frekuensi, dan menu bervariasi bisa memenuhi kebutuhan anak (Kemenkes RI, 2011).

4. ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) merupakan air susu yang dihasilkan seorang ibu setelah melahirkan. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI yang diberikan sejak bayi dilahirkan hingga usia enam bulan tanpa memberikan makanan atau minuman

lainnya seperti susu formula, air putih, air jeruk kecuali vitamin dan obat (Kemenkes RI, 2016)

5. Berat Badan Lahir

Berat badan lahir adalah pengukuran berat badan yang setelah dilahirkan. Berat bayi lahir rendah memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stunting. Dikatakan BBLR jika berat <2500 gram (Kemenkes, 2010). Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan faktor risiko yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak baduta.

6. Pendidikan Orang Tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga mampu meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi pada anak. Tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting hal ini dikarenakan pendidikan yang tinggi dianggap mampu untuk membuat keputusan dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak.

7. Pendapatan Orang Tua

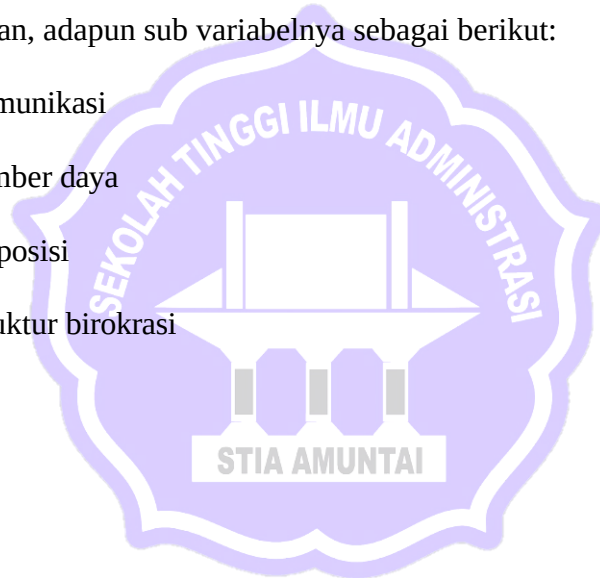
Tingkat pendapatan keluarga memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stunting. Hal ini dikarenakan keluarga dengan pendapatan yang rendah akan mempengaruhi dalam penyediaan pangan untuk keluarga. Daya beli keluarga tergantung dengan pendapatan keluarga, dengan adanya pendapatan yang tinggi maka memungkinkan terpenuhinya kebutuhan makan bagi keluarga.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan acuan dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti secara logis, dan sistematis yang dibuat dengan kedudukan atau tingkat yang dilandaskan dengan teori-teori yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2022:154-158) Implementasi kebijakan, adapun sub variabelnya sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi



Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

